

CATATAN PENUTUP DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Urgensi terjadinya pergeseran paradigma secara mendasar dari strategi industrialisasi yang berspektrum luas dan berbasiskan impor (*Import substitution industry*, ISI) menjadi berbasiskan sumberdaya alam (*resource based industry*, RBI) mensyaratkan suatu dekonstruksi orientasi pemikiran yang mendasari penciptaan instrumen kebijakan ekonomi. Namun perubahan dalam orientasi pemikiran yang menyertai penciptaan instrumen kebijakan tersebut dapat secara bertahap bergeser dengan memulai dari payung makronya. Yakni dengan melakukan *big-push* berupa pilihan strategi pembangunan dan industrialisasi yang berbasiskan sumberdaya alam, khususnya pertanian dan perikanan.

Tentu saja sejauh dan sebesar mungkin seyogyanya dalam RBI ini dilakukan upaya mobilisasi sumberdaya (SDA, tenaga kerja, keahlian manajerial, teknologi, finansial, kewirausahaan, dst.) dari dalam negeri. Sementara, kebutuhan mendatangkan sumberdaya yang diimpor tetap dapat dilakukan, tapi sejauh mungkin bersifat selektif dan sesuai dengan kebutuhan, termasuk misalnya dalam hal bahan baku, keahlian, teknologi, utang bilateral maupun multilateral, investasi langsung dan portofolio. Namun, perlu perencanaan yang sistematis untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri.

Dalam era otonomi daerah yang semakin kongkrit, hendaknya dalam implementasi RBI ini tiap-tiap wilayah pembangunan masing-masing melakukan indentifikasi komoditas-komoditas unggulan yang berorientasi kepada permintaan pasar (*market driven* -- lokal, antara daerah, nasional dan ekspor). Harus ditinggalkan pendekatan sekedar kepada keunggulan teknologi produksi yang akhirnya

menimbulkan kelebihan pasokan dan menekan harga yang seringkali merugikan produsen, sehingga akhirnya menimbulkan demotivasi dan disinsentif bagi para pelaku bisnis. Oleh karena itu, kerjasama yang sinergis antar daerah untuk menentukan komoditas unggulan yang berorientasi pasar yang mampu menghindari *over-supply* tersebut, amat mutlak dilakukan.

Sementara, dalam era demokrasi dalam kerangka *civil society*, harus didorong terjadinya kesadaran untuk mengorganisasikan diri (*self organization*) secara independen dan otonom di kalangan buruh, tani dan nelayan di masing-masing tingkat (lokal, daerah, antar daerah dan nasional). Ini dalam rangka meningkatkan "posisi tawar" mereka secara ekonomi dan politik agar dalam setiap peristiwa yang merugikan dapat dilakukan negosiasi damai untuk berunding dengan pemilik modal, manajer perusahaan dan pemerintah (daerah, pusat). Dengan cara ini tumbuhnya kebutuhan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha (tani, nelayan, petambak, dst.) baik dalam bentuk koperasi maupun lainnya lebih karena *felt-need* dari bawah (kebutuhan real yang benar-benar dirasakan bersama) dan bukan karena kepentingan pihak lain seperti yang telah terjadi di masa lalu.

Selanjutnya, karena kita masih mewarisi sesuatu birokrasi dan kondisi pasar yang sangat terdistorsi di masa lalu, maka mutlak untuk segera melakukan proses rehabilitasi pasar dan birokrasi di pusat maupun di daerah dalam rangka menciptakan *good governance* dan *good corporate governance* serta bekerjanya para pelaku ekonomi berdasarkan signal-signal dari mekanisme pasar yang sehat. Langkah penegakan hukum oleh pengadilan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang (UU anti-monopoli dan persaingan tidak sehat, UU anti-KKN, dst.), kontrol oleh pers, lembaga legislatif dan publik pada umumnya adalah sangat diperlukan untuk mempercepat terjadinya birokrasi bersih, efisien dan pelayan publik yang baik. Juga

mendorong pelaku ekonomi yang bekerja dengan paradigma efisiensi, penciptaan nilai tambah dan inovasi yang terbebas dari KKN, monopoli dan permainan curang. Dengan demikian, proses pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka pemulihan ekonomi dengan pembangunan dan industrialisasi yang berbasiskan SDA dan domestik, akan tercipta oleh lingkungan dunia usaha, birokrasi dan kondisi pasar dan politik yang sehat dan kondusif.

Dalam rangka menghadapi globalisasi yang semakin nyata, implementasi RBI, juga amat mutlak sejak awal dilakukan *set-up* secara sistematis perencanaan perebutan dan penguasaan pelbagai teknologi tepat-guna di segala tingkatan (sederhana, madya dan canggih). Oleh karenanya, alokasi anggaran (pusat dan daerah) terhadap R & D hendaknya memperoleh prioritas tinggi. Juga mutlak men-*set-up* agar pelaku ekonomi yang lebih berspektrum luas dalam rangka membangun kelas menengah yang besar, sehingga UKM, Koperasi yang *genuine*, usaha mikro dan kerajinan menjadi pilar utama strategi RBI. Tentu saja pelaku menengah dan besar seyogyanya muncul dari kebutuhan untuk menciptakan *backward & forward linkage* terutama menghadapi kebutuhan skala ekonomi dan pasar ekspor.

Dengan kerangka payung makro yang diuraikan di atas, maka pelaku UKM, koperasi, mikro dan sektor informal yang berbasis luas tersebut, dan para pelaku usaha di bidang SDA, khususnya di sektor pertanian dan perikanan dapat meraih tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan bekerja dalam kondisi lingkungan pasar yang sehat serta dengan pelayanan birokrasi yang bersih dan sistem politik yang demokratis. Kemudian, pemerintah pusat lebih bekerja sebagai fasilitator, regulator dan menciptakan kepastian hukum serta keamanan. Pemerintah daerah berfungsi mengembangkan model pengembangan yang memperhatikan spesifikasi lokal-daerah (termasuk memperhatikan nilai-nilai dan kelembagaan lokal) ma-

sing-masing untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif antar daerah yang sinergis.

Penanaman modal besar-besaran baik yang dirangsang oleh kebijakan fiskal (pusat dan daerah), moneter dan perkreditan serta investasi portofolio (daerah, nasional dan asing) secara teknis diarahkan kepada pengembangan SDA, khususnya pertanian dan perikanan di tingkat *on-farm*, dalam kerangka pengembangan agribisnis dan agroindustri (industri prasarana produksi, produksi, industri pengolahan, pemasaran dan sistem pendukung). Sementara yang bersifat *off-farm* dikembangkan industrialisasi, baik yang berbasis pedesaan pertanian (*land based villages industrialization*) maupun berbasis pedesaan pantai (*marine based villages industrialization*).

Jika skenario pemulihan ekonomi dapat dicapai sekitar sepuluh tahunan, maka hasil akumulasi devisa dan *public saving*-nya dapat mulai dialokasikan kembali kepada perluasan industri manufaktur (termasuk industri berat, aeronotika, industri dasar, petro-kimia, industri strategis, dst. yang kini tengah bangkrut) yang dalam masa pemulihan cukup dikembangkan hanya dengan meningkatkan kapasitas terpasang yang kini konon hanya bekerja dengan kapasitas rata-rata hanya sekitar 30% yang ditingkatkan mendekati *full-capacity*.

Inilah kiranya gambaran kebutuhan reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional yang kini masih belum jelas arah dan visinya.

Semoga....

Bogor (kota APEC), 22-23 Oktober 2000.